

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Modal Kerja

Modal kerja merupakan elemen penting dalam operasional suatu perusahaan. Secara umum, modal kerja dapat didefinisikan sebagai dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, mencakup pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Modal kerja berfungsi sebagai jembatan antara produksi dan penjualan, memastikan kelancaran aktivitas bisnis serta mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Menurut Sugiono (2019:45), modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari, termasuk membeli bahan baku, membayar upah, dan memenuhi kewajiban jangka pendek lainnya. Sugiono menekankan bahwa modal kerja bukan hanya tentang jumlah uang yang tersedia, tetapi juga tentang bagaimana mengelolanya agar efisien dan mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam pandangan ini, manajemen modal kerja yang efektif dapat meningkatkan likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

Fitriani (2020:78) menyatakan bahwa modal kerja adalah aset yang digunakan untuk memastikan bahwa operasional bisnis dapat berjalan lancar tanpa gangguan akibat kekurangan dana. Ia menambahkan bahwa modal kerja yang memadai memungkinkan perusahaan untuk menghindari risiko kebangkrutan jangka pendek. Fitriani juga menjelaskan bahwa pengelolaan modal kerja yang baik mencakup strategi untuk meminimalkan biaya modal sambil memaksimalkan keuntungan dari aset lancar.

Menurut Rinaldi (2021:102), modal kerja adalah keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar yang harus dijaga agar perusahaan dapat mempertahankan stabilitas keuangan. Ia menekankan bahwa modal kerja bukan hanya tentang ketersediaan dana, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal untuk menciptakan nilai.

tambah. Rinaldi juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan arus kas yang efisien sebagai bagian dari strategi modal kerja.

Sari dan Wibowo (2022:134) mendefinisikan modal kerja sebagai dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas produksi hingga penjualan, mencakup pengelolaan persediaan, piutang, dan kas. Mereka berpendapat bahwa modal kerja yang optimal berkontribusi pada efisiensi operasional perusahaan. Sari dan Wibowo juga menyoroti bahwa modal kerja tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga berhubungan dengan pengelolaan hubungan dengan pemasok dan pelanggan.

Menurut Pratama (2023:67), modal kerja adalah bagian dari keuangan perusahaan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan operasionalnya tanpa gangguan. Ia menambahkan bahwa pengelolaan modal kerja harus berorientasi pada kebutuhan spesifik perusahaan, mengingat perbedaan dalam industri dan skala usaha. Pratama menekankan pentingnya evaluasi rutin terhadap komponen modal kerja, seperti kas, piutang, dan persediaan, untuk memastikan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Dengan demikian, dari berbagai definisi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa modal kerja memiliki peran sentral dalam memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Pengelolaan modal kerja yang baik tidak hanya membantu perusahaan menjaga likuiditas, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

2.1.1 Pengertian Modal Kerja

Modal kerja adalah sejumlah dana atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Modal kerja mencakup aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta menjaga kelangsungan operasional bisnis. Modal kerja juga berfungsi sebagai penggerak utama untuk mencapai tujuan finansial perusahaan, karena pengelolaan modal kerja yang baik akan

mendukung stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Menurut Smith dan Johnson (2019), berpendapat bahwa modal kerja adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya lancarnya agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan efisiensi tinggi. Modal kerja mencakup berbagai aspek seperti pengendalian kas, pengelolaan piutang, dan manajemen persediaan. Penekanan diberikan pada pentingnya keseimbangan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar untuk memastikan stabilitas keuangan. Mereka juga mencatat bahwa perusahaan dengan modal kerja yang sehat cenderung memiliki daya saing yang lebih baik di pasar.

Menurut Thomas dan Jones (2020), mendefinisikan modal kerja sebagai ukuran efisiensi operasional dan likuiditas jangka pendek perusahaan. Dalam bukunya, mereka menyebut bahwa modal kerja tidak hanya mencakup aset yang langsung dapat dikonversi menjadi kas, tetapi juga strategi pengelolaan utang jangka pendek untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Modal kerja yang memadai memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi pasar yang dinamis dan mendukung pertumbuhan jangka panjang melalui investasi pada operasional inti.

Menurut Brown dan Taylor (2021), modal kerja adalah elemen penting yang mencerminkan kesehatan finansial perusahaan. Mereka menekankan bahwa modal kerja adalah modal yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis sehari-hari tanpa harus menggunakan dana eksternal. Dalam konteks yang lebih luas, modal kerja juga mencakup aspek perencanaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan operasional selalu terpenuhi, termasuk dalam situasi krisis atau ketidakpastian ekonomi.

Menurut Lopez dan Garcia (2022), mendeskripsikan modal kerja sebagai aset likuid yang diperlukan untuk menjaga kontinuitas operasional dan fleksibilitas bisnis. Mereka menyatakan bahwa manajemen modal kerja yang efektif melibatkan pengelolaan yang

cermat terhadap persediaan, piutang, dan kewajiban lancar. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya modal kerja dalam membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan pelanggan.

Menurut Williams dan Carter (2023), mendefinisikan modal kerja sebagai alat pengukur efisiensi dan stabilitas finansial perusahaan. Dalam penelitian mereka, modal kerja ditekankan sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan strategi bisnis jangka pendek dan menengah. Mereka juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan modal kerja yang baik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan mitra bisnis.

Menurut Chen dan Lee (2024), menyebutkan bahwa modal kerja adalah komponen utama dalam operasional perusahaan yang berfungsi sebagai pelumas untuk kegiatan bisnis harian. Mereka berpendapat bahwa modal kerja yang optimal tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi dan pengambilan keputusan strategis. Pengelolaan modal kerja yang buruk dapat menghambat kelancaran operasional dan menimbulkan risiko finansial yang signifikan.

Dengan berbagai pandangan di atas, modal kerja dapat disimpulkan sebagai elemen fundamental dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang memengaruhi efisiensi operasional, likuiditas, dan keberlanjutan bisnis. Pengelolaan yang cermat dan strategis terhadap modal kerja akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka pendek maupun panjang.

2.1.2 Komponen Modal Kerja

Modal kerja adalah aset yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pengelolaan persediaan. Modal kerja yang memadai sangat penting untuk menjaga kelancaran operasi bisnis, khususnya dalam menghadapi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Menurut Arifin (2018:26), modal kerja didefinisikan sebagai seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan untuk mendukung operasi bisnis sehari-hari, yang mencakup kas, piutang, dan persediaan. Modal kerja menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan yang sehat, terutama dalam memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu stabilitas operasional perusahaan.

Komponen-Komponen Modal Kerja

Modal kerja terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan memengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Berikut adalah penjelasan tentang komponennya sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah elemen paling likuid dari modal kerja. Menurut Hidayat (2019), kas tidak hanya mencakup uang tunai tetapi juga setara kas, seperti deposito jangka pendek, yang dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan membayar kewajiban jangka pendek.

2. Piutang Dagang

Piutang dagang merupakan aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Siregar (2020) menekankan bahwa piutang menjadi bagian penting dari modal kerja karena menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mengelola kredit pelanggan.

3. Persediaan

Persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang disediakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Pratama dan Nugroho (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan persediaan yang baik berkontribusi terhadap kelancaran operasional dan mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok.

4. Utang Usaha

Utang usaha adalah kewajiban jangka pendek kepada pemasok yang harus dibayar sesuai jatuh tempo. Wahyuni (2022) mencatat bahwa pengelolaan utang usaha yang efisien dapat membantu

perusahaan mengoptimalkan arus kas tanpa mengganggu hubungan dengan pemasok.

5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah uang yang diterima sebelum layanan atau barang diserahkan kepada pelanggan. Menurut Kusuma (2023), elemen ini memberikan keunggulan likuiditas, meskipun perusahaan harus memastikan kewajiban layanan atau pengiriman produk terpenuhi tepat waktu.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat menjelaskan bahwa Komponen modal kerja yang meliputi kas, piutang dagang, persediaan, utang usaha, dan pendapatan diterima di muka sangat penting untuk keberlanjutan operasional perusahaan. Pengelolaan modal kerja yang efisien menjadi kunci bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan likuiditas dan menjaga kelangsungan bisnis.

2.1.3 Jenis-Jenis Modal Kerja

Modal kerja adalah sejumlah dana yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, atau menutupi biaya lain yang diperlukan dalam proses produksi atau distribusi. Menurut Mulyadi (2018:26), modal kerja mencakup dana yang berputar dalam siklus usaha untuk mendukung operasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan tujuan menjaga likuiditas perusahaan.

Menurut Mulyadi (2018:26), terdapat beberapa jenis-jenis modal kerja adalah sebagai berikut:

1. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*)

Modal kerja permanen adalah modal yang harus selalu tersedia dalam jumlah minimum untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan. Modal ini tidak boleh berkurang karena dibutuhkan untuk mendukung kegiatan inti perusahaan secara terus-menerus. **Santoso (2019)** menjelaskan bahwa modal kerja permanen mencakup dana yang diperlukan untuk membiayai persediaan

minimum dan kebutuhan operasional rutin yang tidak berubah meskipun volume aktivitas perusahaan meningkat atau menurun.

2. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*)

Modal kerja variabel adalah modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang sifatnya fluktuatif sesuai dengan perubahan volume bisnis. Menurut Haryono (2020), modal kerja ini bersifat fleksibel dan dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan tingkat permintaan pasar, seperti kebutuhan tambahan untuk pembelian bahan baku atau pembayaran gaji karyawan musiman.

3. Modal Kerja Kotor (*Gross Working Capital*)

Modal kerja kotor adalah total aset lancar yang dimiliki perusahaan tanpa memperhitungkan kewajiban lancar. Wicaksono (2021) menyebutkan bahwa modal kerja kotor mencakup semua aset seperti kas, piutang, dan persediaan yang digunakan untuk mendukung operasi sehari-hari tanpa memperhitungkan utang jangka pendek.

4. Modal Kerja Bersih (*Net Working Capital*)

Modal kerja bersih adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Modal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasinya setelah semua kewajiban jangka pendek terpenuhi. Menurut Pratama (2022), modal kerja bersih menjadi indikator penting dalam menilai likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa mengandalkan pendanaan eksternal.

5. Modal Kerja Temporer (*Temporary Working Capital*)

Modal kerja temporer adalah modal yang hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu dalam periode waktu yang terbatas. Modal ini biasanya digunakan untuk mendanai proyek-proyek atau operasional sementara yang tidak bersifat permanen. Ramadhani (2023) menyatakan bahwa modal kerja temporer umumnya

bersumber dari pinjaman jangka pendek atau sumber dana lain yang hanya digunakan selama periode proyek berlangsung. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat di jelaskan bahwa dengan memahami jenis-jenis modal kerja, perusahaan dapat mengelola asetnya secara efisien dan memastikan keberlanjutan operasionalnya. Pemilihan dan alokasi modal kerja yang tepat juga memengaruhi tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

2.1.4 Pentingnya Modal Kerja

Modal kerja merupakan elemen kunci dalam operasionalisasi sebuah perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Dalam konteks bisnis, modal kerja mengacu pada sumber daya keuangan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah karyawan, biaya utilitas, dan kebutuhan operasional lainnya. Pentingnya modal kerja terletak pada perannya sebagai fondasi utama untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas bisnis. Menurut Brigham dan Houston (2018:26), Berikut adalah beberapa alasan mengapa modal kerja menjadi faktor penting:

1. **Menjamin Kelangsungan Operasional Perusahaan**

Modal kerja yang cukup memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendeknya tanpa harus mengorbankan aset tetap atau mencari pinjaman darurat. Misalnya, perusahaan dapat membayar pemasok tepat waktu, yang pada gilirannya menjaga hubungan baik dan kelancaran suplai barang atau jasa.

2. **Mendukung Fleksibilitas Keuangan**

Dengan modal kerja yang sehat, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menghadapi perubahan mendadak dalam permintaan pasar atau gangguan operasional. Perusahaan yang memiliki cadangan modal kerja yang memadai dapat lebih cepat beradaptasi terhadap fluktuasi ekonomi atau kebutuhan mendesak.

1. Meminimalkan Risiko Keuangan

Modal kerja yang mencukupi dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman jangka pendek yang biasanya memiliki bunga tinggi. Hal ini membantu perusahaan mengurangi beban keuangan dan risiko gagal bayar, yang pada akhirnya mendukung stabilitas keuangan jangka panjang.

2. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Modal kerja memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris dengan lebih baik, menjaga kualitas produk, dan memberikan pelayanan pelanggan secara konsisten. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan dan daya saing di pasar.

3. Mendukung Pertumbuhan dan Ekspansi

Perusahaan yang memiliki modal kerja yang solid dapat lebih mudah merencanakan ekspansi bisnis, baik dalam bentuk pembukaan cabang baru, peluncuran produk, atau investasi pada teknologi baru. Modal kerja yang kuat memungkinkan perusahaan untuk berinovasi tanpa mengganggu operasi utama.

4. Memelihara Kepercayaan Stakeholder

Modal kerja yang baik mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan di mata investor, kreditur, dan mitra bisnis lainnya. Hal ini memberikan kepercayaan kepada stakeholder bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Modal kerja merupakan komponen vital yang mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan stabilitas bisnis. Manajemen modal kerja yang efektif memungkinkan perusahaan untuk menghadapi tantangan keuangan, menjaga hubungan dengan pihak eksternal, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan perlu

memprioritaskan pengelolaan modal kerja untuk memastikan bahwa kebutuhan operasional jangka pendek terpenuhi tanpa mengabaikan tujuan strategis jangka panjang.

2.1.5 Pengelolaan Modal Kerja

Menurut Gitman dan Zutter (2021), Pengelolaan modal kerja merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan, yang bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasi sehari-hari. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar (current assets) dan kewajiban lancar (current liabilities) yang mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen modal kerja yang efektif dapat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Salah satu komponen utama dalam pengelolaan modal kerja adalah pengelolaan persediaan. Persediaan yang berlebihan dapat mengikat modal yang seharusnya bisa digunakan untuk investasi atau kebutuhan operasional lainnya, sedangkan persediaan yang kurang dapat mengganggu kelancaran produksi atau pelayanan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau tingkat persediaan dengan cermat dan melakukan perencanaan yang baik agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok.

Selain persediaan, pengelolaan piutang usaha juga menjadi aspek penting dalam modal kerja. Piutang yang tidak tertagih atau tidak lancar dapat menurunkan likuiditas perusahaan dan mengganggu kelangsungan operasional. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan kredit yang jelas dan efektif, serta melakukan pemantauan secara rutin terhadap piutang yang ada. Penetapan jangka waktu pembayaran yang realistis dan pemeriksaan kelayakan kredit pelanggan sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Pengelolaan utang jangka pendek juga merupakan bagian penting dari modal kerja. Utang yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara jumlah utang dan kemampuan untuk membayar, serta memanfaatkan utang dengan bijak untuk mendukung pertumbuhan usaha tanpa menambah beban keuangan yang berat.

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasi sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pengeluaran operasional lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran operasional perusahaan. Beberapa faktor yang memengaruhi modal kerja di antaranya adalah:

1. Ukuran Perusahaan

Menurut Sudaryanto (2018:26), ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi modal kerja. Perusahaan yang lebih besar cenderung membutuhkan modal kerja yang lebih tinggi karena volume transaksi yang lebih besar serta kebutuhan untuk mempertahankan inventaris yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin dapat mengelola modal kerja dengan lebih rendah karena skala operasional yang lebih kecil dan kurangnya kompleksitas dalam proses produksi.

2. Siklus Produksi dan Penjualan

Siklus produksi dan penjualan mempengaruhi kebutuhan modal kerja, sebagaimana dikemukakan oleh Suyanto (2019). Perusahaan dengan siklus produksi yang lebih panjang membutuhkan modal kerja yang lebih besar untuk membiayai proses produksi yang berlangsung lama sebelum memperoleh pendapatan dari penjualan. Di sisi lain, perusahaan dengan siklus penjualan cepat mungkin

dapat mengelola modal kerja dengan lebih efisien karena perputaran uang yang lebih cepat.

3. Kebijakan Pengelolaan Persediaan

Kebijakan persediaan yang diterapkan perusahaan juga berperan dalam memengaruhi modal kerja. Menurut Jatmiko (2020), perusahaan yang menerapkan kebijakan persediaan yang besar akan membutuhkan modal kerja yang lebih tinggi untuk mengelola stok barang. Sebaliknya, perusahaan yang menggunakan sistem just-in-time atau kebijakan persediaan minimal dapat mengurangi kebutuhan modal kerja karena pembelian dan penggunaan barang yang lebih efisien.

4. Kebijakan Pembayaran dan Penerimaan Piutang

Kebijakan terkait piutang dan pembayaran juga berperan dalam menentukan kebutuhan modal kerja perusahaan. Sari (2021) menjelaskan bahwa semakin lama periode pembayaran yang diberikan kepada pelanggan, semakin besar kebutuhan modal kerja perusahaan, karena dana yang seharusnya dapat digunakan untuk operasi perusahaan terikat dalam bentuk piutang. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan kredit yang bijak agar dapat mengelola modal kerja dengan optimal.

5. Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, tingkat bunga, dan kebijakan pemerintah juga mempengaruhi modal kerja perusahaan. Menurut Yuliana (2022), ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan fluktuasi harga bahan baku dan biaya operasional lainnya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Selain itu, tingkat bunga yang tinggi dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi perusahaan yang membutuhkan pembiayaan eksternal untuk modal kerja.

2.1.6 Indikator Modal Kerja

Menurut Kasmir (2016:251), terdapat beberapa indikator modal kerja adalah sebagai berikut:

1. Perputaran Kas

Perputaran kas mengukur seberapa cepat perusahaan dapat menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya. Indikator ini menggambarkan efisiensi dalam pengelolaan kas yang tersedia dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan operasional tanpa harus bergantung pada sumber dana eksternal.

2. Perputaran Piutang

Perputaran piutang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengelola dan menagih piutang dari pelanggan. Indikator ini menghitung seberapa cepat perusahaan dapat mengubah piutang menjadi kas, yang mencerminkan likuiditas perusahaan dalam mengelola piutangnya

3. Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan mengukur seberapa cepat perusahaan dapat menjual dan menggantikan persediaan barang dalam periode tertentu. Indikator ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan dan seberapa baik perusahaan mampu mengonversi persediaan menjadi pendapatan

2.2 Kelangsungan Usaha UMKM

Kelangsungan usaha UMKM merupakan kemampuan sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi yang berubah-ubah. Faktor-faktor yang memengaruhi kelangsungan UMKM antara lain adalah akses terhadap pasar, modal, teknologi, serta inovasi. Sebagai tulang punggung perekonomian di banyak negara, UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, serta pengurangan ketimpangan ekonomi. Meskipun demikian, tidak sedikit UMKM yang kesulitan dalam mempertahankan operasional

mereka, terutama dalam menghadapi tantangan persaingan pasar yang semakin ketat.

Menurut Mulyadi (2019), kelangsungan usaha UMKM dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan manajerial, kualitas produk, serta inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah, kondisi pasar, serta dukungan dari lembaga keuangan. Mulyadi menyatakan bahwa usaha yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pasar memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang. Dalam hal ini, penting bagi UMKM untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta memperhatikan aspek keberlanjutan dalam operasional mereka.

Menurut Sari dan Rahmat (2020), kelangsungan usaha UMKM juga ditentukan oleh kapasitas adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tren pasar. UMKM yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi digital dan pergeseran preferensi konsumen akan kesulitan untuk tetap relevan. Sari dan Rahmat menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi agar dapat bertahan dalam persaingan global.

Menurut Fitriani (2021), keberlanjutan usaha UMKM sangat dipengaruhi oleh aspek pendanaan dan manajemen keuangan. UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Fitriani mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar bagi UMKM adalah ketidakmampuan mereka dalam mengelola arus kas dan perencanaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki pengetahuan yang baik dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan berbagai program pendanaan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan.

Menurut Prasetyo dan Haryanto (2022), pengembangan UMKM harus didukung oleh kebijakan yang pro-UMKM. Pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kelangsungan usaha

UMKM, seperti memberikan kemudahan akses perizinan, pelatihan keterampilan, serta fasilitas pemasaran. Prasetyo dan Haryanto berpendapat bahwa keberhasilan UMKM dalam mempertahankan usahanya sangat tergantung pada kebijakan yang mendukung akses pasar dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus berinovasi dalam menciptakan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi UMKM.

Menurut Wibowo dan Siti (2023), kelangsungan usaha UMKM tidak terlepas dari kemampuan UMKM dalam membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra usaha. Wibowo dan Siti menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan untuk memastikan keberlanjutan usaha. Selain itu, jaringan bisnis yang kuat dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemasok dan distributor, juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan usaha UMKM. Dalam hal ini, strategi pemasaran yang efektif dan hubungan bisnis yang saling menguntungkan akan memberikan peluang bagi UMKM untuk terus berkembang.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat di jelaskan bahwa Kelangsungan usaha UMKM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kemampuan manajerial, inovasi, dan pengelolaan keuangan yang baik, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan kebijakan pemerintah, akses teknologi, dan hubungan bisnis. Untuk dapat bertahan dan berkembang, UMKM harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan daya saing mereka. Pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha UMKM

2.2.1 Defenisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat

pengangguran. UMKM di Indonesia merupakan sektor yang mendominasi, baik dalam jumlah usaha maupun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum, UMKM dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki skala kecil dalam hal pendapatan, aset, dan jumlah tenaga kerja yang terlibat, namun memiliki potensi untuk berkembang dengan pembinaan yang tepat.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2018), UMKM adalah usaha yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan kriteria pendapatan tahunan, aset, dan jumlah tenaga kerja. Kementerian ini juga menekankan bahwa keberadaan UMKM memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara karena selain menciptakan lapangan kerja, UMKM juga berperan dalam pemerataan ekonomi. UMKM merupakan pilar utama dalam mendukung ketahanan ekonomi di tengah berbagai tantangan globalisasi dan dinamika pasar.

Menurut Suryana (2019), UMKM merupakan usaha yang memiliki skala kecil dalam hal kapasitas produksi dan pendapatan tahunan. Suryana menambahkan bahwa UMKM dapat berkembang melalui akses kepada pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Namun, salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki, baik itu modal, teknologi, maupun keahlian manajerial. Oleh karena itu, UMKM membutuhkan dukungan dalam hal akses pendanaan dan pelatihan sumber daya manusia.

Berdasarkan pendapat Putra (2020), UMKM adalah jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif dengan modal yang relatif kecil namun memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam memasarkan produk atau jasa. UMKM menurut Putra, memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Kendati demikian, Putra mengingatkan bahwa UMKM seringkali kesulitan untuk bertahan lama karena kurangnya perencanaan yang matang dan manajemen yang belum optimal.

Menurut Wahyuni (2021), UMKM merupakan entitas bisnis yang dikelola oleh individu atau keluarga dengan modal terbatas, serta memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Wahyuni berpendapat bahwa keberadaan UMKM di daerah-daerah pedesaan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Melalui produk-produk lokal yang dihasilkan, UMKM dapat menciptakan ciri khas yang menjadi daya tarik di pasar global, meskipun UMKM juga menghadapi tantangan dalam hal akses pasar dan distribusi produk.

Jamal (2022) menambahkan bahwa UMKM adalah sektor yang berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia lokal, memberikan nilai tambah kepada produk yang dihasilkan, serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi secara nasional. Jamal menekankan bahwa meskipun UMKM memiliki kontribusi besar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, namun UMKM sering menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan yang profesional, yang dapat menghambat pertumbuhannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki karakteristik usaha kecil dengan modal terbatas, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang dengan dukungan yang tepat, baik dalam hal akses pasar, pendanaan, maupun pelatihan keterampilan. Kendala yang dihadapi oleh UMKM umumnya terkait dengan terbatasnya sumber daya, manajemen yang kurang efisien, serta akses pasar yang terbatas. Oleh karena itu, pengembangan UMKM memerlukan kebijakan yang dapat mengatasi berbagai hambatan ini agar sektor ini dapat berperan maksimal dalam perekonomian.

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan Usaha UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan kelangsungan UMKM, terdapat

berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Menurut Mulyani (2018:29), memberikan pengertian dan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM.

Menurut Mulyani (2018:29), terdapat beberapa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelangsungan Usaha UMKM

1. Akses terhadap Modal

Kemampuan UMKM untuk mengakses modal sangat mempengaruhi kelangsungannya. Kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal sering menjadi kendala utama bagi banyak UMKM.

2. Kemampuan Manajerial

Kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya, perencanaan keuangan, serta pengambilan keputusan yang tepat sangat berpengaruh pada efisiensi operasional dan daya saing UMKM.

3. Akses ke Pasar

UMKM yang mampu mengakses pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun internasional, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

4. Teknologi dan Inovasi

Pemanfaatan teknologi yang tepat dan kemampuan untuk berinovasi produk menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM.

5. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, seperti pembinaan, kemudahan akses modal, dan insentif pajak, berperan besar dalam kelangsungan usaha ini.

6. Persaingan dan Kondisi Ekonomi

Tingkat persaingan yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas UMKM. Usaha yang tidak mampu bersaing atau beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi akan kesulitan untuk bertahan.

7. Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dalam hal keterampilan dan kemampuan juga menjadi faktor penentu kesuksesan dan keberlanjutan UMKM.

2.2.3 Peran Inovasi dalam Kelangsungan Usaha UMKM

Inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan dan keberlanjutan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian, UMKM dihadapkan pada tantangan untuk terus berkembang, beradaptasi, dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Beberapa ahli mengemukakan pentingnya inovasi dalam keberlangsungan usaha UMKM.

Menurut Suryanto (2018:29), inovasi dalam UMKM tidak hanya berhubungan dengan produk, tetapi juga mencakup inovasi pada proses, pemasaran, serta manajemen. Suryanto menegaskan bahwa inovasi yang dilakukan oleh UMKM dapat membantu mereka untuk lebih efisien dalam operasional, meningkatkan daya saing, dan memperluas pangsa pasar. Dalam konteks ini, UMKM harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengoptimalkan proses produksi dan distribusi.

Dari perspektif Haryanto dan Rahardjo (2020), inovasi di sektor UMKM dianggap sebagai faktor kunci dalam mempertahankan eksistensi usaha di tengah tekanan pasar yang semakin dinamis. Inovasi produk menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Selain itu, strategi inovasi yang tepat juga dapat meningkatkan branding dan citra usaha, sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Menurut Siti Mariam (2021), inovasi dalam hal pemasaran digital menjadi sangat relevan untuk UMKM dalam era digital ini. Mariam menekankan bahwa UMKM harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan

memanfaatkan platform online, UMKM dapat memperluas pasar tanpa terbatas oleh lokasi geografis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penjualan dan memperkuat keberlanjutan usaha.

Menurut Putra dan Daryanto (2022), inovasi dalam manajemen keuangan juga tidak kalah penting. Mereka mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan yang efisien dapat memperkuat daya saing UMKM, memungkinkan mereka untuk bertahan dalam jangka panjang. Inovasi di bidang ini mencakup penggunaan perangkat lunak untuk pencatatan keuangan dan perencanaan anggaran yang lebih tepat.

Menurut Wibowo dan Sulaiman (2023), menyebutkan bahwa budaya inovasi yang terus diterapkan dalam pengelolaan UMKM akan meningkatkan kapasitas adaptasi mereka terhadap perubahan pasar. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pihak lain seperti perguruan tinggi dan lembaga riset untuk menciptakan inovasi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

2.2.4 Tantangan yang dihadapi UMKM dalam Menjaga Kelangsungan Usaha.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian, terutama di Indonesia. Namun, di tengah potensi besar yang dimiliki, UMKM menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam menjaga kelangsungan usaha:

1. Akses Terbatas ke Pembiayaan

UMKM sering kali kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi atau perbaikan usaha. Bank dan lembaga keuangan lainnya sering kali lebih memilih untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan besar yang dianggap lebih aman. Hal ini membuat UMKM terbatas dalam hal modal kerja untuk mempertahankan kelangsungan operasional.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terampil

Banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam mencari dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil. Hal ini terjadi karena keterbatasan dalam menyediakan pelatihan atau pendidikan bagi karyawan, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar.

3. Persaingan yang Semakin Ketat Persaingan yang semakin ketat baik dari sesama UMKM maupun dari perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar seringkali membuat UMKM kesulitan untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Banyak UMKM yang harus berkompetisi dengan harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih baik, sementara mereka terbatas dalam kemampuan untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi operasional.
4. Kurangnya Akses ke Teknologi dan Inovasi Banyak UMKM yang masih bergantung pada metode tradisional dalam menjalankan usaha mereka dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Hal ini membuat mereka tertinggal dalam hal pemasaran, pengelolaan inventaris, dan pengambilan keputusan berbasis data yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis mereka.
5. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah yang Rumit Banyak UMKM merasa terbebani dengan berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah yang dianggap rumit dan sulit untuk dipatuhi. Pembatasan yang ada, baik dalam bentuk pajak, izin usaha, maupun peraturan lainnya seringkali menjadi tantangan besar bagi UMKM dalam menjalankan bisnis mereka secara efisien dan efektif.
6. Ketidakpastian Pasar dan Ekonomi Perubahan dalam kondisi ekonomi makro, seperti fluktuasi harga bahan baku, nilai tukar mata uang, atau krisis ekonomi global, dapat berdampak langsung pada UMKM. Ketidakpastian pasar sering kali membuat UMKM

kesulitan dalam merencanakan strategi jangka panjang atau mengelola risiko yang dihadapi oleh usaha mereka.

7. Manajemen Keuangan yang Lemah Banyak UMKM yang masih belum memiliki pemahaman yang cukup dalam hal pengelolaan keuangan yang baik. Manajemen kas yang tidak efektif, pengelolaan utang yang buruk, dan ketidaktahuan dalam hal pencatatan yang rapi sering menjadi faktor yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan di UMKM.

2.2.5 Indikator Kelangsungan Usaha UMKM

Menurut Mulyadi (2020), terdapat beberapa indikator keberlangsungan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan indikator utama yang menggambarkan sejauh mana suatu usaha mampu mengelola keuangannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek ini mencakup kemampuan dalam memperoleh laba, menjaga arus kas, efisiensi penggunaan modal, serta stabilitas dalam memenuhi kewajiban finansial. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan atau UMKM memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

2. Inovasi Produk dan Layanan

Inovasi produk dan layanan adalah upaya untuk menciptakan, mengembangkan, atau memodifikasi produk maupun layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga dapat berupa perbaikan kualitas, peningkatan fungsi, maupun penambahan nilai tambah. Tingkat inovasi yang tinggi membantu usaha mempertahankan daya saing, memperluas pasar, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia mencakup strategi dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. SDM yang kompeten adalah aset penting yang dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional usaha. Aspek ini juga meliputi pelatihan, motivasi, pemberian insentif, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pengelolaan SDM yang baik akan berkontribusi besar pada pencapaian tujuan usaha secara keseluruhan.

4. Adaptasi terhadap Perubahan Pasar dan Lingkungan

Kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan lingkungan adalah indikator penting yang mencerminkan fleksibilitas usaha dalam menghadapi dinamika eksternal. Perubahan ini bisa berupa tren konsumen, kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, maupun perkembangan teknologi. Usaha yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah bertahan dalam situasi persaingan yang ketat. Adaptasi yang baik juga memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang baru sekaligus meminimalkan risiko yang muncul akibat perubahan lingkungan bisnis.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Prasetyo (2021)	Pengaruh Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan pada UMKM di Kota Medan	Modal kerja berpengaruh signifikan sebesar 60% terhadap kinerja keuangan UMKM; peningkatan modal kerja dapat meningkatkan likuiditas dan profitabilitas.

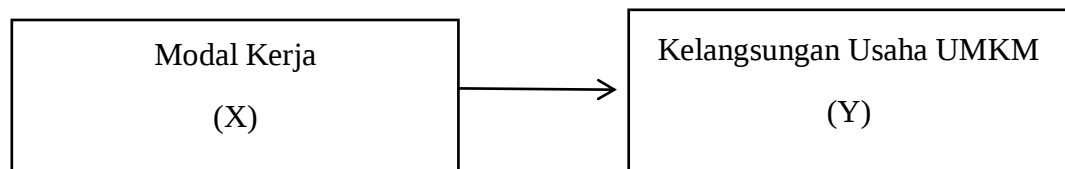
2	Suharto (2022)	Peran Modal Kerja dalam Menunjang Keberlangsungan UMKM di Kota Bandung	Modal kerja berpengaruh sebesar 55% terhadap keberlangsungan usaha; pengelolaan modal kerja yang efisien penting untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan UMKM.
3	Putri (2020)	Analisis Pengaruh Modal Kerja terhadap Kelangsungan Usaha UMKM di Surabaya	Modal kerja memberikan kontribusi sebesar 65% terhadap kelangsungan usaha; pengelolaan modal kerja yang tepat berpengaruh pada stabilitas operasional dan keberlanjutan usaha.
4	Widodo (2023)	Pengaruh Modal Kerja terhadap Kemampuan Bertahan Usaha UMKM di Yogyakarta	Modal kerja memiliki pengaruh 70% terhadap kemampuan bertahan UMKM; ketersediaan modal kerja penting untuk menghadapi fluktuasi pasar dan menjaga kelangsungan usaha.
5	Suryadi (2021)	Keterkaitan Modal Kerja dengan Keberlangsungan Usaha pada UMKM di Kota Malang	Modal kerja berpengaruh 50% terhadap keberlangsungan usaha; modal kerja yang tidak memadai menimbulkan kesulitan operasional dan mengancam kelangsungan UMKM.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiono (2019:47) "Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting". Untuk memudahkan atau memberikan gambaran pada pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat di kemukakan kerangka pemikiran yang menggambarkan terkait dengan variabel Modal kerja yang dapat mempengaruhi Kelangsungan Usaha UMKM di Pasar kota gunungsitoli yang di gambarkan pada gambar

Gambar 2.5
Kerangka Berpikir



2.5 Hipotesis

Menurut Suryabrata (2018:21), bahwa Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris". Penerimaan hipotesis terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan asumsi tersebut, maka hipotesis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Ha : Ada Pengaruh Modal Kerja Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM pada Pasar Ya'ahowu Kota Gunungsitoli
- Ho : Tidak ada Pengaruh Modal Kerja Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM pada Pasar Ya'ahowu Kota Gunungsitoli